

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Diberlakukannya Otonomi Daerah mengakibatkan daerah memiliki hak, wewenang dan kewajibannya dalam mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan ini, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan tersebut tentu disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang terkait dalam kerangka desentralisasi fiskal. Akibat dari pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana tersebut tentu adalah kebutuhan akan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatur pengelolaan keuangan daerah serta pertanggungjawabannya

menyebutkan pertanggungjawaban tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawabannya, yang tentunya harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 telah menjelaskan tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu periode. Sementara, laporan kinerja instansi pemerintah daerah merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah daerah ini menggambarkan keluaran atau hasil dari kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur sehingga dapat menjelaskan kinerja dan tanggungjawab pengelolaan anggaran keuangan selama satu periode.

Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya laporan

keuangan daerah harus diaudit dan dalam hal ini diaudit oleh BPK. Laporan keuangan diaudit untuk memeriksa salah satunya apakah laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan, juga apakah laporan keuangan sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ada.

PSAK No. 1 dalam SAK (2009, 5) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas etas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga harus memiliki kriteria dan unsur-unsur pembentukan kualitas laporan yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah no. 71 Tahun 2010) Tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Dalam PP No 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa keterandalan laporan keuangan akan terpengaruhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dikatakan andal juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Informasi yang andal memiliki karakteristik antara lain (a) Penyajian jujur yaitu

informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. (b) Dapat diverifikasi yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. (c) Netralitas yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Menurut Wahyono (2004, 12) dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai (keterandalan) disini menyangkut dua elemen pokok yaitu, informasi yang dihasilkan dan sumber daya menghasilkannya. Menyangkut informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai kemampuan dalam informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Kemudian menyangkut kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem atau yang menghasilkan informasi tersebut, yang dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya di bidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (keterandalan).

Menurut Suwardjono (2012, 50) Penggunaan teknologi informasi digunakan dan diandalkan dalam pelaporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh karena itu,

informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi akan sangat membantu dalam proses pengolahan data transaksi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan terbebas dari kesalahan material yang disebabkan oleh *human eror*.

Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Kapasitas sumber daya manusia yang memadai, namun jika tidak didukung dengan teknologi informasi belum tentu bisa menghasilkan laporan keuangan yang andal.

Terbatasnya pegawai pemerintah yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman atau penguasaan aparatur Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan tanggungjawab dan menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik keterandalan, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting (Karmila, Tanjung dan Darlis, 2013, 54).

Didalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bab Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian Intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas yang bersangkutan (Badan Pemeriksaan Keuangan RI, 2006).

Masalah-masalah yang ditemukan oleh pihak BPK dalam laporan keuangan pemerintah seperti ketidakpatuhan, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan dan temuan penyimpangan administrasi dan kelemahan sistem pengendalian intern menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik atau nilai informasi yang disyaratkan yaitu keandalan. Oleh karena itu, dengan melihat temuan BPK tentang kelemahan sistem pengendalian intern tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pengendalian intern ini menjadi sangat penting karena sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, meyakinkan para *stakeholder* maupun publik tentang keakuratan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah dibutuhkan sistem pengendalian intern yang optimal.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akurat menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern dalam laporan keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektifitas dan mencegah terjadinya kerugian keuangan Negara demi kepentingan masyarakat dan daerah.

Beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern Akuntansi. Hasil dari kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern Akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Karanganyar (Setianingrum, 2016). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2016) bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Surakarta.

Dengan adanya perbedaan pada hasil penelitian-penelitian yang lain, menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian terkait pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem teknologi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan variabel independen kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi

pengendalian intern akuntansi dan lokasi penelitian yaitu di Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Peneliti akan melakukan penelitian di seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pemerintah pusat sudah menyiapkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 yang akan di serahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Setelah BPK RI memeriksa LKPD tersebut, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*) untuk LKPD Provinsi DKI Jakarta. Opini WDP tersebut ternyata sudah didapatkan selama 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2013, 2014 dan tahun 2015 (Jakarta.bpk.go.id). Hal ini berarti LKPD Provinsi DKI Jakarta masih mengandung kelemahan-kelemahan dan belum mampu memenuhi kualitas informasi yang baik

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada UKPD di Kota Administrasi Jakarta Pusat)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas , maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada UKPD di Kota Administrasi Jakarta Pusat) ?
- b. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada UKPD di Kota Administrasi Jakarta Pusat) ?
- c. Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada UKPD di Kota Administrasi Jakarta Pusat) ?
- d. Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan tinjauannya dari sudut pandang Islam (studi pada UKPD di Kota Administrasi Jakarta Pusat) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada UKPD di Kota Administrasi Jakarta Pusat)
- b. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada UKPD di Kota Administrasi Jakarta Pusat)

- c. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada UKPD Kota Administrasi Jakarta Pusat)
- d. Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan tinjauannya dari sudut pandang Islam (studi pada UKPD di Kota Administrasi Jakarta Pusat)

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti

Memperoleh tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan serta mengetahui faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

- b. Bagi Akademis

Dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya, selain itu dapat dijadikan bahan bacaan dan dapat digunakan untuk mendapat pengetahuan.

- c. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan Pemerintah Daerah akan memperoleh masukan tentang seberapa pentingkah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian

intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, Studi Pada UKPD di Kota Administrasi Jakarta Pusat.